

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan modal dasar kemajuan suatu negara. Majunya sektor pendidikan di suatu negara dapat menjadi pondasi yang kuat untuk negara tersebut, karena suksesnya sektor pendidikan dapat memajukan sektor-sektor yang lainnya. Pendidikan juga membentuk karakter suatu bangsa dan menjadikan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas.

Setiap negara memiliki standar pendidikannya masing-masing. Begitu pun dengan kebijakan yang dibuat oleh setiap negara berbeda-beda dalam bidang pendidikannya. Kebanyakan negara maju memiliki standar pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan negara berkembang.

Dalam setiap negara memiliki beberapa jenjang tingkatan pendidikan yang harus diikuti oleh semua warganya. Tingkatan jenjang pendidikan itu dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kebanyakan negara maju telah mewajibkan warganya mengikuti pendidikan sampai tingkat tinggi, sehingga kualitas pendidikan di negara maju biasanya lebih baik. Akan tetapi di negara-negara berkembang yang kebanyakan warganya masih belum memperhatikan kualitas pendidikan, mewajibkan warganya untuk mengikuti pendidikan tingkat dasar, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya secara bertahap.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki standar pendidikan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Untuk memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan program wajib belajar sembilan tahun untuk mempercepat akselerasi penuntasan wajib belajar. Pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Bahkan ada pula yang sudah mencanangkan program wajib belajar dua belas tahun.

Seluruh warga Indonesia mempunyai kewajiban minimal mengikuti proses pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk

memenuhi standar pendidikan yang telah ditentukan. Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjamin hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya memiliki alasan-alasan tersendiri. Alasan tersebut menjadikan program ini dirasa penting untuk dilakukan di Indonesia. Adapun kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia ini dipicu oleh beberapa faktor menurut Syarif (dalam Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, hlm 17) faktor tersebut yaitu 1) lebih dari 50 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, 2) program wajib belajar sembilan tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pula pada kegiatan ekonomi, 3) semakin tinggi pendidikan maka akan semakin besar partisipasi dan kontribusi di sektor-sektor produktif, 4) dengan peningkatan dari wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa dan 5) wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 hingga 15 tahun.

Penunjang bagi keberhasilan kebijakan pemerintah untuk pendidikan ini, yaitu keberadaan fasilitas. Fasilitas pendidikan merupakan tempat dimana proses pendidikan berlangsung. Biasanya fasilitas tersebut dalam bentuk bangunan sekolah. Keberadaannya merupakan suatu kewajiban di setiap negara. Jumlah fasilitas sekolah pun harus diperhatikan dan tersebar merata di setiap wilayah negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Agar semua warga dapat dengan mudah mengakses fasilitas tersebut dan pemerataan pendidikan pun dapat terjadi. Menurut Hadjam dan Widhiarso (dalam Ramdan, 2014, hlm. 7) mengatakan bahwa keberadaan sekolah sebagai sub sistem tatanan kehidupan sosial, menempatkan lembaga sekolah sebagai bagian dari sistem sosial. Oleh karena itu sekolah harus peka dan tanggap dengan harapan dan tuntutan masyarakat sekitarnya.

Selain keberadaan fasilitas sekolah yang merata di setiap wilayah negara dan berimbang dengan jumlah penduduk, sarana pendidikan dalam fasilitas tersebut juga harus memadai. Agar program wajib belajar tersebut dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai. Oleh karena itu, sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang sangat

vital, karena akan mendukung keberlangsungan program tersebut. Tanpa adanya fasilitas dan sarana sekolah yang memadai tidak mungkin program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

Keberhasilan program pendidikan yang telah diterapkan harus dievaluasi dengan cara dihitung. Perhitungan tersebut menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu sesuai dengan kelompok usianya. Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni dijadikan tolak ukur pencapaian keberhasilan program belajar yang telah dijalankan untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia. Perhitungan ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah siswa yang bersekolah di suatu daerah dibagi jumlah penduduk usia sekolah, yaitu rentan 13-15 tahun untuk SMP dan 7-12 tahun untuk SD lalu dikali 100%. Dari hasil perhitungan tersebut dibagi kedalam empat tingkatan ketuntasan yaitu tuntas pratama, tuntas madya, tuntas utama dan tuntas paripurna. Pencapaian tingkatan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di suatu wilayah. Dari hasil perhitungan setiap provinsi maka akan didapatkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi provinsi masing-masing.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki ketimpangan akan persebaran sarana pendidikan dan menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pun menjadi kecil. Salah satu wilayah Jawa Barat yang masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah dan harus ditingkatkan yaitu Kabupaten Sukabumi, karena angka partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah untuk tingkat pendidikan dasar. Hal tersebut diketahui menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2015), capaian APK dan APM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014/2015 yaitu 104,82% APK dan 95,45% APM untuk Sekolah Dasar, 98,91% APK dan 82,13% APM untuk Sekolah Menengah Pertama. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sukabumi yaitu 108,2% APK dan 96,37% APM untuk Sekolah Dasar, 94,07%

Nurul Hamdanah, 2017

*EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN SUKABUMI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

APK dan 73,72% APM untuk Sekolah Menengah Pertama. Angka APK dan AMP Kabupaten Sukabumi hampir sama dengan Jawa Barat. Meskipun APK dan APM Kabupaten Sukabumi untuk tingkat Sekolah dasar sudah baik, akan tetapi angka APM untuk Sekolah Menengah Pertama belum sebaik angka APK. Oleh karena itu, ketuntasan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Sukabumi perlu lebih ditingkatkan kembali. Sehubungan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah kabupaten terluas di Jawa Barat, memungkinkan banyaknya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut menuntut untuk sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga dapat mengolah sumberdaya alam dengan baik.

Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yaitu 4.162 km², dengan ketinggian 0-2.960 di atas permukaan air laut (BPS, 2014). Terbangun topografi yang bervariasi dari arah utara sampai selatan. Menurut Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalibang, 2015) jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yaitu 2.434.221 jiwa. Wilayah Sukabumi terbagi kedalam dua zona yaitu utara dan selatan. Apabila dilihat dalam peta, zona utara merupakan wilayah yang dibatasi oleh Gunung Gede Pangrango dan berbatasan dengan wilayah Bogor serta Cianjur, sedangkan Sukabumi selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan wilayah Cianjur juga Banten. Wilayah Sukabumi utara lebih maju dibandingkan dengan wilayah Sukabumi selatan dalam segi pembangunan.

Terpusatnya pembangunan di sebelah utara Kabupaten Sukabumi, karena wilayahnya strategis dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan antara Cianjur, Sukabumi dan Bogor. Hal tersebut menyebabkan terkonsentrasinya penduduk di bagian utara, sehingga menjadikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga lebih banyak terjadi di wilayah utara. Akan tetapi, wilayah pesisir selatan Sukabumi kurang diperhatikan, karena wilayahnya yang kurang strategis dan terletak di pesisir pantai. Salah satu wilayahnya yaitu Kecamatan Cisolok, yang juga merupakan wilayah perbatasan sebelah barat dan selatan Sukabumi.

Kecamatan Cisolok langsung berbatasan dengan Provinsi Banten yaitu Kabupaten Bayah. Dilihat dari bentang alamnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) wilayah Kecamatan Cisolok memiliki kondisi geografis yang terdiri

atas perbukitan dan pesisir pantai dengan luas 21.964 Km² menjadikan persebaran penduduk di wilayah ini tidak merata. Kecamatan Cisolok sendiri memiliki 13 desa yaitu Pasir Baru, Cikahuripan, Cisolok, Cikelat, Sirnaresmi, Caringin, Gunung Karamat, Gunung Tanjung, Cicadas, Karangpapak, Sukarame, Wanajaya dan Wangunsari. Desa-desa di wilayahnya terbagi atas 4 desa yang berada di wilayah pantai dan 9 desa berada di wilayah pegunungan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, adapun yang termasuk kedalam desa wilayah pantai adalah Cisolok, Karangpapak, Cikahuripan, dan Pasir Baru (BPS, 2014).

Setiap desa memiliki jumlah fasilitas sekolah yang berbeda-beda. Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Cisolok yaitu 83 sekolah yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2016). Sekolah yang telah ada tersebut belum diketahui apakah sebarannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, dan juga jumlah keberadaan sekolah telah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Cisolok ini.

Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kajian yang dapat mengevaluasi sebaran lokasi sekolah yang telah ada, dan menghitung keseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah penduduk setempat. Perhitungan keseimbangan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk dapat mengetahui kekurangan fasilitas pendidikan yang terjadi di masyarakat. Evaluasi sebaran lokasi dapat melihat sebaran lokasi sekolah apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum dan juga mempermudah penempatan lokasi apabila akan didirikan sekolah baru, sehingga lokasi tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar masyarakat mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama dan merata di setiap penjuru wilayah Kecamatan Cisolok, dan juga dapat mewujudkan salah satu misi dari Kecamatan cisolok yaitu meningkatkan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik serta pelayanan umum masyarakat (sukabumikab.go.id, 2016).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan, maka pola sebaran dan analisis lokasi sekolah menurut kondisi fisik dan sosial di Kecamatan Cisolok

Nurul Hamdanah, 2017

*EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN SUKABUMI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat jangkauan pelayanan sekolah yang telah ada, sehingga dapat dengan mudah melayani masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah. Dari sinilah teretusnya sebuah ide penelitian yang berjudul **“Evaluasi Sebaran Lokasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi”** yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dan khususnya di Kecamatan Cisolok.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang maka dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana sebaran sekolah jenjang pendidikan dasar di Kecamatan Cisolok?
2. Bagaimana sebaran sekolah menurut kondisi fisik di wilayah Kecamatan Cisolok?
3. Bagaimana sebaran sekolah menurut kondisi sosial di wilayah Kecamatan Cisolok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, yaitu :

1. Memetakan sebaran sekolah dan pelayanan sekolah di Kecamatan Cisolok
2. Memetakan sebaran sekolah di wilayah Kecamatan Cisolok menurut kondisi fisik
3. Memetakan sebaran sekolah di wilayah Kecamatan Cisolok menurut kondisi sosial

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bahwa teori tidak selalu berbanding lurus dengan praktik atau fakta yang ada di lapangan. Ada masa dimana peraturan mutlak yang dibuat dalam undang-undang pada saat

dilapangan tidak dapat terealisasi dengan mudah, sehingga adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari aturan yang telah dibuat.

2. Praktis

Secara praktis, adapun manfaat yang bisa diberikan dari penelitian ini yaitu untuk:

a. Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan agar dapat menempatkan fasilitas sekolah di wilayah yang tepat berdasarkan kebutuhan dan faktor geografis yang mendukung keberadaan sekolah di wilayah tersebut, dan dapat tersebar merata meskipun di wilayah pelosok sehingga dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.

b. Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang memang membutuhkan adanya sarana pendidikan yaitu sekolah, sehingga dapat diakses dengan mudah.

c. Penulis

Sebagai sarana pencarian pengalaman, wawasan dan pengetahuan dari penelitian dan dari masyarakat serta sebagai sarana silaturahmi dengan masyarakat dan memperbanyak saudara.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang sesuai dengan sistematika penulisan skripsi, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi pemaparan latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan juga struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II berisi tentang teori-teori yang bersangkutan dengan tema penelitian yang diambil dari buku, jurnal, undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah tentang lokasi sekolah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metode penelitian yang dipakai, lokasi dari penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, alat dan bahan yang

Nurul Hamdanah, 2017

*EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN SUKABUMI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipakai untuk penelitian, alur dari penelitian, teknik pengambilan data, serta teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV berisi pemaparan tentang hasil penelitian, yaitu jawaban dari rumusan masalah yang ada pada Bab I.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V berisi simpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya ataupun bagi pihak yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi literatur-literatur atau referensi yang dipakai dalam penelitian yang berisi teori-teori maupun kutipan-kutipan yang bersumber dari buku, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah ataupun artikel serta internet.

F. Penelitian terdahulu

Tabel 1
Anotasi Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Lembaga Penelitian	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1	Ali Ahmadi dan Ariyani Indrayati, 2014, UNNES	Studi Penentuan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Tingkat SLTA Di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati	Belum ada studi mengenai evaluasi daya layan SLTA dengan penduduk usia SLTA, dan studi mengenai penentuan lokasi bagi fasilitas yang akan dibangun	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa metode deskriptif kuantitatif Multilevel analisis. Analisis pertama dilakukan pada tingkat Kabupaten Pati dengan populasi semua SLTA. Analisis yang kedua adalah mengambil level di bawahnya yaitu level Kecamatan, dan dalam hal ini diambil kasus di Kecamatan Tambakromo.	Hasil penelitian ini di bagi kedalam 3 (tiga) bagian pertama mengenai Arahan Pengembangan Lokasi Berdasarkan Faktor fisik kedua adalah Arahan Pengembangan Lokasi Berdasarkan Faktor aksesibilitas serta yang ke tiga adalah Penentuan Site (Letak) Lokasi Sekolah

Sumber : diolah oleh penulis

Lanjutan...

2	Waleed Lagrab, Noura AKNIN, 2015, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 03	Analysis Of Educational Services Distribution Based Geographic Information System (GIS)	to redistribute the existing kindergarten and choose the best location in the future and applying the standard criteria for selecting the suitable locations for kindergarten.	<ul style="list-style-type: none"> • The research methodology divided into five stages • General Survey and theoretical • Data Collection • Data preparation • Spatial and Quantitative Analysis • Results and conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • This study is based on equity in the distribution of educational services with a view to achieving the best service to all residents, and takes into account all the quantitative and spatial criteria in the capacity of kindergarten within their area and the acceptable estimated distance. • The education facilities must be placed in locations far from the land uses that have an influence on the quality of education, and the health and safety of children achieve an equitable, fair distribution of educational services, this phase was begun with collected and repair data and the analysis
3	Khalid Al-Rasheed, Hamdy I. El-Gamily, 2013, Kuwait University	GIS as an Efficient Tool to Manage Educational	Such critical results will enable the decision makers to prioritize the immediate action of relocation the schools or	This task focused on data needs analysis and GIS requirements analysis to identify applications that will	72% of the districts lack the existence of kindergarten schools, which require an urgent plan to resolve such critical problem.

Nurul Hudaerah, 2017

Sumber : diolah oleh penulis *JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI*
 universitas pendidikan indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Lanjutan...

		Services and Infrastructure in Kuwait	widen the services and accessibility	be built to utilize the geodatabase. Figure 1 provides a block diagram illustrating the project development methodology to inventory, map and analyze MoE facilities and infrastructure.	<ul style="list-style-type: none"> This kind of school at such younger age might require re-planning of allocating more than one school per block to ease the accessibility; only 12% achieved such high standard. This was also the case of the primary school where about 71% of the districts lack to host single primary school.
4	Esli D. Takumansang, TEKNO/Volume08/No. 54/DESEMBER 2010	Kajian Penempatan Fasilitas Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Aspek Sistem Informasi Geografis	mengkaji faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam merencanakan penempatan fasilitas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah dalam aspek Sistem Informasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dilakukan dengan Sistem Informasi Geografis Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan Teknik analisis data dengan Overlay dan buffering 	<ul style="list-style-type: none"> perencanaan penempatan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan baik, mulai dari proses pengumpulan data sampai pada proses analisis dan perencanaannya. Sistem informasi geografis sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis data yang terkait dengan perubahan di dalam komunitas.
Sumber : diolah oleh penulis					

Nurul Hamdanah, 2017

EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Lanjutan...

					Indikator-indikator yang digunakan dalam penyediaan dan penempatan fasilitas pendidikan adalah : Indikator pemenuhan kebutuhan masyarakat Indikator daerah jangkauan layanan Indikator kesesuaian lokasi Indikator aksesibilitas.
5	Mazloh Al-Enazi, Saleh Mesbah, Amani Anwar, 2016, Arab Academy for Science	Schools Distribution Planning using GIS in Jeddah City	The studies indicate that Jeddah underwent tremendous transportation infrastructure expansion from 1964 to 2007. Transportation infrastructure increased rapidly from 136 km to 435 km in 1970 to 1980, with a change of 69% and an annual growth of 6.9% respectively. Most of the transportation infrastructure in Jeddah was constructed during this period	The aim of this paper is to use GIS functions (overlay analysis, and buffer) in evaluating spatial distribution of schools	The results are utilized in evaluating spatial distribution of schools, which can help planner in managing the distribution of the future schools at Jeddah city.

